

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2020



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO**

JL. Proklamasi No. 2 Purworejo 54111 Telp/Fax (0275) 325202

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Dengan mendukung Visi, Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo, Visi "Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan". Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo mendukung Misi Bupati Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo Salah satunya :

Misi "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis Pariwisata, Pertanian, industri dan Perdagangan.

Menjadikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang menyelenggarakan tugas urusan Pemerintah bidang penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan telah menyusun rencana kerja tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo tahun 2016 – 2021, Renstra dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Dalam Rencana Kerja tahun 2020 menyajikan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan Daerah.

Purworejo, Juni 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO,S.H

Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

A. Pengertian Renja Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

B. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif

- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- d. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja :

- Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Penyusunan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
- Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas Rencana Kerja
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
- Penyempurnaan rancangan kerja PD
- Pembahasan forum PD
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

c. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

d. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

e. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2020 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIMDA Integrated dalam proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020. Implementasi aplikasi SIMDA Integrated merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja DINPMPTSP Tahun 2020 ini berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 tahun 2012 tentang Sistem Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
17. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renja disusun sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

b. Tujuan

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran dalam kurun waktu 1 tahun.
2. Untuk meningkatkan pelayananan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna mendukung visi dan misi Bupati .

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo terdiri dari 4 Bab sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3	Isu – Isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4	Review terhadap Rancangan awal OPD
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
3.1	Telaah terhadap Kebijakan nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja OPD
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

Berdasarkan Renja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengusulkan 8 (delapan) program dan 31 (tigapuluh satu) kegiatan sebagai berikut :

Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Penyusunan data dasar Pembangunan
6. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral
7. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
8. Program Peningkatan Promosi Investasi

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
10. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala Arsip
16. Pemeliharaan rutin/berkala Komputer
17. Pengiriman Diklat
18. Penyusunan Pelaporan Keuangan
19. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
20. Penyusunan Data Dasar Pembangunan
21. Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral
22. Pelayanan perizinan
23. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
24. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
25. Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan

26. Pengembangan Penanaman Modal
27. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
28. Promosi dan Kerjasama Investasi
29. Pengembangan Audio Visual Potensi dan Profil Investasi
30. Pemetaan Potensi Investasi
31. Panggung Reklame/Spanduk

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN **BELANJA LANGSUNG** APBD TAHUN 2018.

1. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL :
a. Program Pelayanan Administrasi Kantor

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 9.316.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.617.900,-
 - c) Kinerja Anggaran : 81,76%
 - d) Rencana Output : Pelayanan Surat Masuk dan Keluar selama 12 bulan
 - e) Realisasi Output : Tersedianya surat masuk dan keluar selama 12 bulan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : - Belanja Perangko tidak dimohon karena pengiriman surat melalui intranet.
 - Kepindahan gedung kantor ke lingkungan setda sehingga biaya perjalanan dinas dalam daerah berkurang.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada perencanaan selanjutnya.

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 81.000.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 55.311.988,-
 - c) Kinerja Anggaran : 68,29%
 - d) Rencana Output : Penyediaan rekening langganan telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya rekening langganan telepon, internet, listrik dan air selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Kepindahan gedung kantor ke lingkungan setda untuk langganan listrik dan air dibebankan pada bagian umum setda
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan selanjutnya

- 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 12.334.200,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.334.200,-
 - c) Kinerja Anggaran : 100%
 - d) Rencana Output : Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 jenis.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.255.900,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.213.200,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,41%
 - d) Rencana Output : Kwitansi Dinas dan penggandaan sejumlah 2 jenis
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Kwitansi Dinas dan sejumlah 2 jenis
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 3.266.700,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 3.232.900,-
 - c) Kinerja Anggaran : 98,97%
 - d) Rencana Output : Penyediaan 8 jenis Komponen Instalasi Listrik
 - e) Realisasi Output : Tersedianya 8 jenis Komponen Instalasi Listrik
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.294.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.294.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,94%
 - d) Rencana Output : Penyediaan Surat Kabar selama 12 bulan.

- e) Realisasi Output : Tersedianya Surat Kabar selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 21.822.400,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 21.767.600,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,75%
 - d) Rencana Output : Penyediaan minuman harian pegawai, Rapat dan Tamu selama 11 bulan.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya minuman harian pegawai, Rapat dan Tamu selama 11 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 101.517.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 101.483.809,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,97%
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.550.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.525.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,71%
 - d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
 - e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 10) Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.319.700,-

- b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.319.700,-
- c) Kinerja Anggaran : 100%
- d) Rencana Output : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebanyak 10 jenis.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.139.548,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 19.118.800,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,89%
- d) Rencana Output : Pemeliharaan Gedung Kantor seluas 660 m²
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 660 m²
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 41.900.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 40.799.763,-
- c) Kinerja Anggaran : 97,37%
- d) Rencana Output : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- e) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 3 unit dan Kendaraan Dinas Roda 2 sebanyak 6 unit
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

13) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 20.820.400,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 20.273.500,-
- c) Kinerja Anggaran : 97,37%
- d) Rencana Output : Pengadaan AC Split 1 PK 3 buah, Gorden Binder Blind 1 unit.

- e) Realisasi Output : Tersedianya AC Split 1 PK 3 buah, Gorden Binder Blind 1 unit.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 5.433.800,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 5.393.800,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,26%
 - d) Rencana Output : Jasa Pemeliharaan AC 4 unit
 - e) Realisasi Output : Kenyamanan kerja
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 75.100.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 72.039.950,-
 - c) Kinerja Anggaran : 95,93%
 - d) Rencana Output : Tertatanya arsip perizinan, Pengolahan data dan Penataan arsip, Pemeliharaan arsip.
 - e) Realisasi Output : Tertatanya arsip perizinan, Pengolahan data dan Penataan arsip, Pemeliharaan arsip.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 15.993.177,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.992.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,99%
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan 9 unit komputer, 3 unit Laptop, dan 3 unit printer
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya 9 unit computer, 3 unit laptop dan 3 unit printer.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 17) Pengiriman Diklat

- Lokasi Kegiatan : Prov. Jateng dan Luar Jateng
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 38.485.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 37.231,260,-
- c) Kinerja Anggaran : 96,74%
- d) Rencana Output : Diklat Penanaman Modal dan Perizinan 12 OH
- e) Realisasi Output : Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan petugas tentang Penanaman Modal dan Perizinan 100%
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18) Penyusunan Pelaporan Keuangan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 8.800.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.669.800,-
- c) Kinerja Anggaran : 98,52%
- d) Rencana Output : Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
- e) Realisasi Output : Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (bulanan, triwulan, semesteran, tahunan) sebanyak 19 dokumen
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

19) Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 17.000.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 15.159.150,-
- c) Kinerja Anggaran : 89,17%
- d) Rencana Output : Penyusunan dokumen Renja, RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.
- e) Realisasi Output : Tersusunnya dokumen Renja, RKA,/DPA, LAKIP, LKPJ, DPPA, LPPD sebanyak 10 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : biaya penggandaan DPA 2019 belum bisa direalisasikan pada akhir tahun 2018
- h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan selanjutnya

e. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

20) Penyusunan Data Dasar Pembangunan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 7.499.500,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,99%
- d) Rencana Output : Penyediaan dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- e) Realisasi Output : Tersedianya dokumen Data Dasar bidang Penanaman Modal dan Perizinan 1 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

f. Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral

21) Fasilitas Sektor Sumber Daya Mineral

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 25.656.900,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 25.534.000,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,52%
- d) Rencana Output : Fasilitas ESDM.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Fasilitas ESDM
- f) Kinerja Output : 100 %
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

g. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

22) Pelayanan Perizinan

- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 285.114.200,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 281.933.797,-
- c) Kinerja Anggaran : 98,88%
- d) Rencana Output : Cetak blangko Perizinan 93 jenis, Peninjauan lokasi 72 kali, Sticker/.Tanda Izin 2000 lbr, Rakor Tim Pembina Perizinan 1 kali, Rakor Tim Teknis Perizinan 12 kali, Pakaian khusus DPMPTSP 32 buah.
- e) Realisasi Output : Cetak blangko Perizinan 93 jenis, Peninjauan lokasi 72 kali, Sticker/Tanda Izin 2000 lbr, Rakor Tim Pembina Perizinan 1 kali, Rakor Tim Teknis

- Perizinan 12 kali, Pakaian Khusus DPMPTSP 32 buah.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -
- 23) Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan
- Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 115.203.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 114.064.207,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,01%
 - d) Rencana Output : Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan, Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Launching Pengembangan Aplikasi Perizinan.
 - e) Realisasi Output : Terpeliharanya Aplikasi SIM Perizinan, Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan, Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Launching Pengembangan Aplikasi Perizinan
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 24) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 18.095.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 17.997.900,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,46%
 - d) Rencana Output : Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev, layanan pengaduan 1 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Data Informasi dan Rekomendasi Hasil Monev, Layanan Pengaduan sejumlah 1 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : -
 - h) Solusi : -
- 25) Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 68.860.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 68.401.700,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,33%
 - d) Rencana Output : Peraturan Bupati 2 dokumen
 - e) Realisasi output : Tersedianya Peraturan Bupati 2 dokumen (Perbup reklame No. 79 Th. 2018 dan Perbup Insentif No. 20 Th. 2018)

- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

h. Program Peningkatan Promosi Investasi

26) Pengembangan Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Luar Daerah
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 108.948.800 ,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 105.044.080,-
- c) Kinerja Anggaran : 96,42%
- d) Rencana Output : Operasional Klinik Investasi 12 bl, Koordinasi Penanaman Modal 12 bl, Temu Inverstor 1 kali.
- e) Realisasi Output : Terlaksananya Operasional Klinik Investasi 12 bl, Koordinasi Penanaman Modal 12 bl, Temu Investor 1 kali.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

27) Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 46.456.000,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 46.137.411,-
- c) Kinerja Anggaran : 99,31%
- d) Rencana Output : Operasional Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 12 bulan, Laporan Pengawasan dan Pengendalian 3 jenis.
- e) Realisasi Output : Tersedianya Bahan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal sejumlah 1 dokumen.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

28) Promosi dan Kerjasama Investasi

- Lokasi Kegiatan : Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah
- a) Jumlah Anggaran : Rp. 292.587.500,-
- b) Realisasi Anggaran : Rp. 281.555.459,-
- c) Kinerja Anggaran : 96,23%
- d) Rencana Output : Pelaksanaan Promosi CJIBF 1 kali, Pameran di Jawa Tengah 1 kali, Pameran di Luar Jawa Tengah 1 kali, Publikasi Penanaman Modal dan Perizinan 1 paket.

- e) Realisasi Output : Terlaksananya Promosi CJIBF 1 kali, Pameran di Jawa Tengah 1 kali, Pameran di Luar Jawa Tengah 1 kali, Publikasi Penanaman Modal dan Perizinan 1 paket.
- f) Kinerja Output : 100%
- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -
- 29) Pengembangan Audio Visual Potensi dan Profil Investasi
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 23.500.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 21.750.000,-
 - c) Kinerja Anggaran : 92,55%
 - d) Rencana Output : Audio Visual Potensi dan Profil Investasi 1 unit
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Audio Visual Potensi dan Profil Investasi 1 unit
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Sisa kontrak/tender
 - h) Solusi : -
- 30) Pemetaan Potensi Investasi
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 142.383.700,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 97.585.400,-
 - c) Kinerja Anggaran : 68,54%
 - d) Rencana Output : Peta dan Profil Investasi 1 dokumen.
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Peta dan Profil Investasi 1 dokumen.
 - f) Kinerja Output : 100%
 - g) Permasalahan : Efisiensi honorarium tenaga ahli, yang semula 4 tenaga ahli menjadi 1 tenaga ahli dan 3 tenaga profesional yang standar honorariumnya 0,5 dari honorarium tenaga ahli.
 - h) Solusi : Penyesuaian pada Perencanaan selanjutnya
- 31) Panggung Reklame
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Purworejo
 - a) Jumlah Anggaran : Rp. 119.690.000,-
 - b) Realisasi Anggaran : Rp. 118.608.500,-
 - c) Kinerja Anggaran : 99,09%
 - d) Rencana Output : Panggung Reklame/Spanduk 10 buah
 - e) Realisasi Output : Tersedianya Panggung Reklame/Spanduk 10 buah.
 - f) Kinerja Output : 100%

- g) Permasalahan : -
- h) Solusi : -

Capaian kinerja Program dan kegiatan tahun 2018 rata – rata mencapai 94,07%. Tingkat capaian tersebut berdasarkan realisasi program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a.1 Tugas, Fungsi

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;

- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan terpadu yang meliputi penanaman modal, perizinan dan data, sistem informasi dan pengaduan;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan DINPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo melayani beberapa perizinan sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Ada 93 (sembilan puluh tiga) Perizinan yang dilayani yaitu :

NO	NAMA IZIN
1	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
2	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
3	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
4	IZIN PRINSIP PENGABUNGAN PENANAMAN MODAL
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL
6	IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL
7	IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
8	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL
9	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
10	IUJK (IZIN USAHA JASA KONTRUKSI)
11	IZIN PENYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM
12	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI 1000 M
13	IZIN LOKASI
14	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON FORMAL
15	IZIN USAHA INDUSTRI

16	IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI
17	IUKI (IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI)
18	IPUKI (IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI)
19	LPK (IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA)
20	IMTA (IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING)
21	IZIN USAHA PERDAGANGAN
22	IUP2T (IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL)
23	IUPP (IZIN USAHA PUSAT PEMBELANJAAN)
24	IUTM (IZIN USAHA TOKO MODERN)
25	IZIN OPERASIONAL SIMPAN PINJAM KOPERASI
26	IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
27	IZIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
28	IZIN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
29	IZIN PELAYANAN JASA PARAMEDIK VETERINER
30	IZIN JAGAL HEWAN
31	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG HEWAN
32	IZIN PENDIRIAN RUMAH PEMOTONG UNGGAS
33	IZIN GANGGUAN
34	IZIN LINGKUNGAN
35	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN
36	B3 (IZIN PENGUMPULAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)
37	PPLH (IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
38	IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH
39	PKL (IZIN RISET SURVAI PENELITIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN)
40	LSM (IZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT)
41	IZIN REKLAME BERKONTRUKSI
42	IZIN REKLAME NON KONTRUKSI DAN INSIDENTIL
43	IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
44	IZIN PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
45	IZIN OPERASIONAL PANTI
46	IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG
47	IZIN PENGGUNAAN SARANA UMUM
48	IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP
49	IZIN TRAYEK ANGKUTAN
50	IZIN USAHA ANGKUTAN
51	IZIN BONGKAR MUAT
52	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD SWASTA

53	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP SWASTA
54	IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAH RAGA
55	IZIN PEMAKAIAN/GELANGGANG OLAH RAGA
56	IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
57	PAUD (IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
58	IZIN/REKOMENDASI KEGIATAN BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN
59	IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
60	IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
61	IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
62	IZIN MENDIRIKAN KLINIK
63	IZIN OPERASIONAL KLINIK
64	IZIN KLINIK PELAYANAN HEMODIALISIS
65	IZIN PENYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
66	UTD (IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH)
67	IZIN APOTEK
68	IZIN PENYELANGGARAAN LABOLATORIUM KLINIK UMUM PRATAMA
69	IZIN PENYELANGGARAAN OPTICAL
70	IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
71	IZIN TOKO OBAT
72	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/GIGI SPESIALIS
73	SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
74	SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)
75	SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
76	SIKPG DAN SIPPG (IZIN PRAKTIK DAN IZIN PERAWAT GIGI)
77	SIKPAN DAN SIPPAN (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA PERAWAT ANESTHESI)
78	SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)
79	SIPF DAN SIKF (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA FISIOTHERAPIS)
80	SIK-ALM(IZIN PENYELANGGARAAN PRAKTIK AHLI TEGNOLOGI LABOLATORIUM MEDIK)
81	SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
82	SIPTGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZI)
83	SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
84	IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
85	SIKR (IZIN KERJA RADIO GRAFER)
86	SIKRO (IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTROMETIS)
87	SIKTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL)
88	IZIN USAHA MENENGAH OBAT TRADISIONAL

NO	DAFTAR NON PERIZINAN
89	TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
90	TDG (TANDA DAFTAR GUDANG)
91	TDUP (TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA)
92	STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL)
93	SPP-IRT (SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN-INDUSTRI RUMAH TANGGA)

Dalam melaksanakan pelayanan telah menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan), maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengurusan perizinan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Kerjasama SDM di Internal DPMPTSP yang cukup baik;
3. Adanya Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
4. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (e-permit);

5. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

KELEMAHAN (W):

1. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten Purworejo;
2. Teknologi informasi berkembang pesat;
3. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat diharapkan oleh masyarakat;
4. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAN (T):

1. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
2. Koordinasi antar instansi teknis dalam pemberian Perizinan belum optimal;
3. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di DPMPTSP Kab. Purworejo;
4. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengurus langsung perizinan di DPMPTSP (menggunakan jasa pihak ketiga);
5. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Bahwa dalam proses penyusunan rancangan awal RKPD, hasil indentifikasi permasalahan menjadi konsep rumusan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa kebutuhan OPD kemudian dipilah antara program dan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya seperti:

- Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang – undang yang mengatur tentang prinsip- prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik;
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Tujuan

Adapun tujuan Renja adalah sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Sasaran

Terciptanya pelayanan yang berkualitas, berdaya saing dan sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM).

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pelayanan Perizinan tertuang dalam Misi Bupati terpilih yaitu menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu pada agribisnis, yang didukung birokrasi professional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peran aktif sektor swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan pelayanan perizinan dapat diukur dari capaian kinerja layanan berdasarkan peningkatan jumlah izin yang dikeluarkan setiap tahun dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) yang meningkat.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dirumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan;
 - b. Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Pengelolaan Kebersihan Kantor;
 - d. Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Peralatan dan perlengkapan Kantor yang diadakan : 6 unit
 - b. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
 - Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala : 1 unit/tahun
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dipelihara rutin/berkala
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur : 10 OH

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan 19 dokumen
 - b. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan 10 dokumen
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
 - a. Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1 dokumen
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
 - a. Pelayanan Perijinan 12 bulan
 - b. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan 12 bulan
 - c. Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan 1 dok
 - d. Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan 2 dokumen.
7. Program Peningkatan Promosi Investasi
 - a. Pengembangan Penanaman Modal 12 bulan
 - b. Promosi dan Kerja Sama Investasi 3 kali
8. Program fasilitasi penyelenggaraan energi sumber daya mineral
 - a. Fasilitasi sektor sumber daya mineral 1 dokumen

Lokasi / sasaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwoerejo Tahun 2020 adalah OPD dan Masyarakat.

Detail Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada Matriks Program dan Kegiatan OPD

**MATRIK RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2020**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1,509,010,300.00				2,084,328,143.00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
212	Penanaman Modal				1,489,996,000.00				2,063,412,143.00
2,121	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	250,547,400.00			100.00 %	275,604,100.00
212,125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DINPMPTSP	12.00 Bulan	35,469,200.00	DAU		12.00 Bulan	39,017,000.00
212,126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DINPMPTSP	12.00 Bulan	50,734,000.00	DAU		12.00 Bulan	55,808,000.00
212,127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DINPMPTSP	12.00 Bulan	4,097,800.00	DAU		12.00 Bulan	4,508,000.00
212,128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DINPMPTSP, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	160,246,400.00	DAU		12.00 Bulan	176,271,100.00
2,122	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	173,086,700.00			100.00 %	615,779,043.00
21,229	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	DINPMPTSP	6.00 unit	68,760,700.00	DAU		12.00 unit	491,693,243.00
212,222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	1.00 Unit/Th	27,846,000.00	DAU		1.00 Unit/Th	30,631,000.00
212,224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	8.00 Unit/Th	48,912,000.00	DAU		8.00 Unit/Th	63,130,000.00
212,228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	9.00 Unit/Th	27,568,000.00	DAU		10.00 Unit/Th	30,324,800.00
2,125	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	36,312,000.00			100.00 %	39,945,000.00
21,256	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Jateng dan Luar Jateng	10.00 Org	36,312,000.00	DAU		12.00 Org	39,945,000.00
2,126	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	21,470,000.00			100.00 %	29,800,000.00
21,265	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DINPMPTSP	19.00 Dok	3,216,000.00	DAU		19.00 Dok	9,000,000.00

21,266	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DINPMPTSP	10.00 Dok	18,254,000.00	DAU		10.00 Dok	20,800,000.00
2,127	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	7,500,000.00			100.00 %	8,500,000.00
21,271	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DINPMPTSP	1.00 Dok	7,500,000.00	DAU		1.00 Dok	8,500,000.00
2.12.15	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani		100.00 %	589,111,700.00			100.00 %	641,964,000.00
212,151	Pelayanan Perizinan	Cetak Blangko Perizinan	Kabupaten Purworejo	4650 Lbr	317,378,700.00	DAU		4650 Lbr	347,097,000.00
		Peninjauan Lokasi Perizinan		72 Kali				72 Kali	
		Pakaian Dinas Khusus DINPMPTSP		0 Stel				0 Stel	
		Pembuatan Stiker Tanda Izin		8500 Lbr				8500 Lbr	
		Rakor Tim		10 Kali				10 Kali	
		Jasa Perseorangan		3.00 Org				3.00 Org	
212,154	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan	Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	122,167,600.00	DAU		12.00 Bulan	132,365,000.00
		Jasa Perorangan Staf Operator SIM Perizinan		24.00 OB				24.00 OB	
		Jasa Perorangan Staf Pengolahan Data Perizinan		12.00 OB				12.00 OB	
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1.00 kali				1.00 kali	
212,155	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Data Informasi dan Rekomendasi hasil monev	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	133,996,000.00	DAU		1.00 Dok	145,376,000.00
		Jasa Perseorangan		3.00 Org				3.00 Org	
		Focus Group Discussion		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Pemutihan IMB		1.00 Kecamatan				1.00 Kecamatan	
212,156	Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan	Kabupaten Purworejo	2.00 Dok	15,569,400.00	DAU		2.00 Dok	17,126,000.00
2.12.16	Program Peningkatan Promosi investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi		2.00 %	411,968,200.00			2.00 %	451,820,000.00
212,161	Pengembangan Penanaman Modal	Koordinasi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	119,403,200.00	DAU		12.00 Bulan	131,344,000.00
		Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
		Laporan Kegiatan Wasdal (Monitoring LKPM)		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Kegiatan Satgas Berusaha		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
		Forum Pengembangan Penanaman Modal (Bussiness Forum)		1.00 Kali				1.00 Kali	
212,163	Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Promosi CJIBF	Jawa dan Luar Jawa	1.00 kali	292,565,000.00	DAU		1.00 kali	320,476,000.00

		Pelaksanaan Pameran di Luar Jawa		1.00 kali				1.00 kali	
		Mengikuti Pameran Purworejo Expo		1.00 kali				1.00 kali	
		Mengikuti kegiatan yang mendukung pameran dan kerjasama investasi		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
3	Urusan Pilihan								
35	Energi dan Sumberdaya Mineral				19,014,300.00				20,916,000.00
3.5.15	Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas ESDM		100.00 %	19,014,300.00			100.00 %	20,916,000.00
35,151	Fasilitas Sektor Sumber Daya Mineral	Fasilitas Perizinan Bidang ESDM	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	19,014,300.00	DAU		1.00 Dok	20,916,000.00

BAB V

PENUTUP

Tema OPD tahun 2020 adalah Melanjutkan Pembangunan Menuju Masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera berbasis Agrobisnis.

Rencana Kerja yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai satu persepsi tentang rencana kerja yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal.

Rencana Kerja disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah pada level OPD dan disusun sebagai penjabaran Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di tingkat pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2020 disusun untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Keberhasilan program dan kegiatan yang ada pada Renja tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. Semoga Renja yang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam pembangunan khususnya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Juni 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO,S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19620227 198903 1 007